MASYARAKAT MENGELUH MINIMNYA INFORMASI SERTA KURANGNYA PROKES DI PANGKALBALAM

Kamis, 28 April 2022 - Agung Nugraha

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com - Pelayanan Lembaga Negara terhadap masyarakat, khususnya dalam hal arus mudik lebaran tahun 2022 nampaknya menjadi fokus Ombudsman RI baik tsecara nasional maupun tingkat provinsi melalui Ombudsman perwakilan tiap daerah.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (26/4/2022) yang lalu melakukan pemantauan dibeberapa titik layanan , seperti Bandara Depati Amir, Pelabuhan Pangkabalam, dan Posko Pelayanan Mudik, Selasa (26/4/2022). Dalam pantauannya, Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung menaruh perhatian lebih terhadap masyarakat, sebagai peserta mudik berdasarkan protokol kesehatan Covid-19 (Prokes), serta persiapan penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Ombudsman Babel melakukan pemantauan arus mudik sebagai salah satu bentuk pengawasan untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan tertib. Pada tahun ini, mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Ombudsman perlu melakukan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan agar dapat mencegah terjadinya peningkatan penularan virus Covid-19 sebagaimana SE Ketua Ombudsman RI Nomor 16 Tahun 2022", Ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (27/4/2022).

Menurut pihak Ombudsman, sejauh ini penerapan prokes di Bandara Depati Amir relatif baik dari pihak pengelola bandara. Dilihat dari cukupnya ketersediaan petugas pengawas prokes lintas instansi. Berbeda halnya dengan Bandara Depati Amir, Ombudsman menilai, Pelabuhan Pangkal Balam harus segera memperbaiki fasilitas dalam hal prokes dan pelayanannya.

Menurut Ombudsman , pemantauan arus mudik Pelabuhan Pangkal Balam dari segi penerapan prokes, diperlukan peningkatan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan, mungkin dalam hal ini Port Corporation (IPC) atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Ombudsman Babel mengaku masih menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, tempat cuci tangan tidak berfungsi dengan baik, tidak ada pengecekan suhu pada penumpang perjalanan. Selain itu, terjadi kerumuman penumpang yang terjadi di loket tiket maupun ruang tunggu tanpa adanya imbauan melalui pengeras suara maupun teguran dari petugas. Dalam kegiatan ini juga ada masyarakat yang mengeluhkan terkait minimnya informasi dari pihak pelabuhan. Sehingga mereka kebingungan untuk mendapatkan informasi yang valid akan alur pelayanan di Pelabuhan Pangkal Balam.

Namun, Ombudsman Babel mengapresiasi dari KSOP Pangkal Balam yang mengedepankan keselamatan penumpang dalam arus mudik dengan memastikan kelaikan kapal dapat berlayar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Serta apresiasi tersebut diberikan juga untuk penerapan prosedur protokol kesehatan didalam kapal.

Untuk titik pantauan terakhir, Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung memantau posko mudik yang diselenggarakan oleh PPK 1.3 Satker PJN (Pelaksana Jalan Nasional) Wilayah I pada ruas Pangkalpinang - Sungailiat. Ombudsman Babel mengapreasi layanan yang disediakan kepada masyarakat dengan menyediakan toilet *portable,* perlengkapan dan vitamin/obat-obatan bagi pelaku perjalanan, serta layanan pengaduan masyarakat perbaikan jalan yang berlubang. Namun Ombudsman berharap sosialisasi mengenai Posko ini harus lebih gencar disosialisasikan lagi.

"Posko ini sepertinya akan berguna bagi masyarakat, akan tetapi, lebih baik jika pihak PPK 1.3 Satker PJN Wilayah I dapat menginformasikan hal ini secara luas baik melalui media ataupun melalui *banner* yang dapat diletakkan di sekitar Posko ini, karena kami lihat belum ada satupun pelaku perjalanan yang mengakses posko ini. Secara keseluruhan, kami akan terus memantau pelaksanaan pelayanan mudik ini, sekaligus memberikan saran dan masukan bagi perbaikan layanan kedepan, semoga tetap konsisten meningkat ke arah lebih baik pelaksanaannya sampai arus balik mudik setelah lebaran nanti" tutup Yozar.